

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH GAKKUMDU**
**(Kajian Tentang Politik Uang dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)**

TESIS

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

**MUSLIHANNISA
1820112058**

DOSEN PEMBIMBING:

Pembimbing I : Prof. Dr. Ismansyah., S.H., M.H

Pembimbing II : Dr. Nani Mulyati., S.H., M.CL

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH OLEH GAKKUMDU**

**(Kajian Tentang Politik Uang dan Penggunaan Fasilitas Negara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman)**

**Muslihannisa, NIM 1820112058, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2022**

Email : muslihannisa@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun dalam proses pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai perbuatan yang dapat merugikan orang banyak, dan integritas dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri, salah satunya tindak pidana pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah. Adapaun rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman). 2) Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman). 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan Kepala Daerah oleh Gakkumdu (Kajian tentang politik uang dan fasilitas negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Padang Pariaman). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Penegakan hukum terhadap tindak pidana sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak efektif karena dari 3 (tiga) temuan kasus pidana yang ditangani tidak ada kasus yang sampai pada tingkat pengadilan, semua kasus berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana ini dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum terdiri dari 5 (lima) yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi sentra penegakan hukum terpadu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah dengan melaksanakan tugasnya sebagai pemegang penegak hukum tanpa adanya pengaruh internal maupun eksternal dari suatu kebijakan dengan tujuan agar proses demokrasi berjalan dengan aman, tenram, serta terciptanya keadilan.

Kata kunci: Penegak Hukum, Tindak Pidana, Pemilihan Kepala Daerah, Gakkumdu, Politik Uang, Penggunaan Fasilitas Negara

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF REGIONAL HEAD ELECTIONS BY GAKKUMDU

(A Study of the Politics of Money and the Use of State Facilities in the Election of Regents and Deputy Regents in Padang Pariaman)

(Muslihannisa, NIM 1820112058, Master of Law Study Program, Faculty of Law, Andalas University 2022)

ABSTRACT

The election of the Regional Head of Padang Pariaman Regency as a form of democracy must be carried out in accordance with the provisions of the legislation, but in the process of its implementation it cannot be separated from various actions that can harm a lot of people, and the integrity of the implementation of the Regional Election. In this case, the integrated law enforcement center (Gakkumdu) enforces the law on the crime of regional head elections. Problems to be studied are: 1) How is the law enforcement against the criminal act of election of regional heads by Gakkumdu (Study of money politics and the use of state facilities in the election of regents and deputy regents in Padang Pariaman). 2) What are the obstacles in law enforcement against the criminal act of regional head elections by Gakkumdu (Study of money politics and the use of state facilities in the election of regents and deputy regents in Padang Pariaman). 3) How are the efforts made to overcome the obstacles faced in law enforcement against the criminal act of regional head elections by Gakkumdu (Study of the politics of money and state facilities in the election of regents and deputy regents in Padang Pariaman). The research method used in this study is empirical juridical. Based on the results of the study, it can be concluded: Law enforcement against criminal acts of integrated law enforcement centers in handling criminal acts for the election of the head of Padang Pariaman region is ineffective because of the 3 (three) findings of criminal cases handled there are no cases has reached the court level, all cases stop on the second discussion of Sentra Gakkumdu. The obstacles faced in law enforcement of criminal acts are associated with factors that affect law enforcement consisting of 5 (five) namely legal factors, law enforcement, facilities and facilities, society, and culture. To overcome the obstacles by the integrated law enforcement center in law enforcement of regional election crimes is to carry out its duties as a law enforcement holder without any internal and external influence of a policy with the aim that the democratic process runs with the creation of justice, safely, peacefully.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Local Elections, Gakkumdu, Money Politics, Use of State Facilities